

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa abad Montenegro merupakan sebuah prinisipalitas merdeka de facto yang diatur oleh sebuah penguasa dan dinasti berdasar keturunan. Negara ini mendapatkan pengakuan internasional de jure tentang kemerdekaannya, setelah Krisis Timur (1875-1878) di Kongres Berlin. Antara 1945 dan 1992, Montenegro merupakan bagian dari Republik Sosialis Federal Republik Yugoslavia. Dari 1992 hingga 2003, Montenegro bergabung dengan Serbia untuk membentuk Republik Federal Yugoslavia. Pada tahun 2003 Republik Federal Yugoslavia kemudian diubah sehingga hubungan antara Serbia dan Montenegro lebih terpisah dan namanya berubah menjadi Serbia dan Montenegro.¹

Sebagian besar teritori eks Republik Federal Yugoslavia (RFY) terletak di tengah-tengah pertemuan geopolitik kawasan Balkan, fakta tersebut menunjukkan betapa besarnya arti geopolitik yang dikandung oleh eks negara Republik Federal Yugoslavia. Eks negara Republik Federal Yugoslavia terletak di pertengahan jarak pendek antara wilayah Eropa dan Mediteranian, wilayah-wilayah eks negara Republik Federal Yugoslavia merupakan penghubung antara Eropa dengan Asia Timur Dekat dan Timur Jauh serta Mediteranian sehingga merupakan transit dari Euro-Asia. Eks negara Republik Federal Yugoslavia merupakan wilayah

penyangga antara dua pengaruh yakni pengaruh eks. Pakta Warsawa dan pengaruh NATO, serta penghubung atau jembatan antara Eropa dan Turki dan negara-negara di wilayah Timur Tengah. Disintegrasi eks Yugoslavia yang menciptakan negara-negara pecahan kecil tidak merubah posisi strategis eks negara Republik Federal Yugoslavia bahkan tidak satupun dari negara pecahan eks Yugoslavia mempunyai posisi strategis sentral seperti eks negara Republik Federal Yugoslavia. Komposisi wilayah Yugoslavia yang terdiri dari daratan, laut, pantai, pegunungan, danau dan sungai-sungai yang merupakan komposisi lengkap, menggambarkan negara eks Yugoslavia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam dan sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi maupun bagi kepentingan pertahanan dan keamanan.²

Serbia dan Montenegro bekerja sama hanya dalam sejumlah bidang politik (misalnya dalam pertahanan). Kedua negara ini mempunyai kebijakan ekonomi dan mata uang yang terpisah. Mereka tidak lagi mempunyai satu ibukota yang sama, dan lembaga-lembaga bersamanya dibagi dua antara Beograd di Serbia dan Podgorica di Montenegro.³ Serbia dan Montenegro eksis dari 2003 hingga 2006 saat Montenegro memutuskan untuk memisahkan diri melalui sebuah referendum. Namun oleh sebuah referendum yang dilaksanakan pada 21 Mei 2006, Montenegro mendeklarasikan kemerdekaannya pada 3 Juni 2006.⁴

Menurut kelompok penentang kemerdekaan, Montenegro sebagai bagian dari Uni dengan Serbia akan mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi anggota Uni Eropa, ketimbang sendiri. Uni Eropa tidak mengharapkan

² <http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel15/balkanisasi1.htm>, diakses 7 Februari, 2007

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Serbia_dan_Montenegro, diakses 7 Februari, 2007

Montenegro merdeka. Karena itu berdirilah Uni Serbia Montenegro. Tapi Perdana Menteri Montenegro Milo Djukanovic hanya menyepakati Uni tersebut, apabila masyarakat, melalui referendum diberi kesempatan menyuarakan pendapat mengenai Montenegro merdeka. Djukanovic pun dianggap menjadi pemimpin kemerdekaan Montenegro. Dikelilingi kelompok sekitar 20 sahabat keluarga, Djukanovic berhasil menguasai hampir semua bidang baik ekonomi, politik maupun media. Ia memainkan peranan paling kuat selama 15 tahun terakhir. Djukanovic yakin bisa mempercepat proses keanggotaan Montenegro dalam Uni Eropa dan NATO, apabila Montenegro bisa bebas dari Serbia. Serbia, dan secara otomatis juga Montenegro, dijatuhi sanksi oleh Brussel, karena belum juga berhasil menangkap dan mengekstradisi Jenderal Ratko Mladic kepada Tribunal Yugoslavia di Den Haag. Perundingan dengan Brussel ditunda. Sementara Presiden Federasi Yugoslavia, Vojislav Kostunica dan Perdana Menteri Serbia, Zoran Djindjic ingin agar federasi tetap dipertahankan, tetapi bersedia memberikan hak otonomi luas kepada Montenegro. Maret 2006, Parlemen Montenegro dengan suara bulat mendukung usulan untuk mengadakan referendum bersejarah mengenai kemerdekaan dari Serbia pada 21 Mei 2006. Uni Eropa akhirnya menuntut agar minimal separuh dari semua pemilih harus memberikan suara. Selain itu, Brussel baru mengakui kemerdekaan Montenegro apabila didukung oleh minimal 55% pemilih. Pada 22 Mei 2006, Presiden Komisi Referendum Frantisek Lipka mengumumkan hasil penghitungan suara sementara referendum, di mana 55,4 persen rakyat Montenegro yang berpartisipasi dalam referendum

44,6 persen pemilih menentang ide kemerdekaan itu. Dari 485.000 pemilih yang terdaftar, sekitar 86,3 persen menggunakan haknya. Berdasarkan ketentuan dari Uni Eropa, hasil referendum dinyatakan sah jika salah satu pihak minimal memperoleh 55% suara.⁵

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, maka timbul pokok permasalahan yaitu :

“Mengapa Montenegro Memisahkan diri dari Serbia?”

C. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah suatu bentuk paling umum yang memberi tahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi.⁶ Jadi dalam hal ini teori digunakan sebagai kerangka dasar analisa dalam menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan meramalkan berulangnya kejadian itu dimasa mendatang. Untuk itu guna menjelaskan pokok permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan Konsep Nasionalisme dan Konsep Separatisme.

1. Konsep Nasionalisme

Dalam kamus politik ideologi modern, nasionalisme berarti menyatakan keunggulan suatu afinitas kelompok yang didasarkan atas bahasa, budaya, keturunan bersama dan terkadang kepada agama dan wilayah bersama pula terhadap semua pengakuan lain atas loyalitas seseorang. Sebagai doktrin politik, isme ini mengaku memberi basis dan pembenaran ideologis bagi semua bangsa

⁵ Ibid,

dunia untuk mengorganisir dirinya sendiri kedalam entitas-entitas yang bebas atau otonom. Entitas-entitas ini sebagian besar mengambil bentuk negara nasional merdeka, walaupun ada contoh dimana beberapa negara nasional kedaerahan atau kultural juga dilembagakan. Pada khususnya ini terjadi di negeri-negeri seperti Yugoslavia, Swiss atau Belgia yang terdiri atas dua atau lebih kelompok nasional yang lebih kecil yang menyadari sulitnya atau mustahil mencapai kemerdekaan sempurna.⁷

Istilah *nasionalis* atau *nasional*, yang berasal dari kata Latin yang berarti "lahir di", kadangkala tumpang tindih dengan istilah yang berasal dari kata Yunani, *etnik*. Namun istilah yang terakhir ini biasanya digunakan untuk menunjuk pada kultur, bahasa dan keturunan bersama diluar konteks politik. Asal-usul doktrin nasionalisme terdapat di lingkungan pergaulan Jerman abad kedelapanbelas yang secara kultur bersatu tetapi secara politik terpecah-belah, dan dalam pergolakan luas di Eropa yang di sebabkan oleh Revolusi Prancis.⁸ Lambang nasionalisme adalah makna kedaerahan yang dimanifestasikan melalui cinta seseorang terhadap tanah air, bahasa tertulis dan bahasa sehari-hari, tradisi seni dan kesusastraan, sejarah yang bersifat narasi (sebagai lawan dari legenda dan cerita rakyat), dan sering pula kesinambungan tentang kekhawatiran pada musuh dari satu generasi ke generasi lain yang mana permusuhan riil maupun imajiner tadi mengancam keamanan negara-bangsa itu. *National self-determination* (kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri) merupakan kepercayaan idealistis yang lahir dari Revolusi Prancis, sehingga alasan untuk

perdamaian akan bisa dijalankan apabila setiap bangsa mampu memilih tujuan politiknya sendiri.⁹

Inggris pada abad ke 17 biasanya dianggap sebagai negara bangsa modern pertama dimana nasionalisme dan konsep yang berhubungan dengannya yaitu patriotisme, menjadi sama atau seimbang dengan gagasan mengenai kebebasan individual dan partisipasi umum dalam kehidupan publik. Revolusi Amerika (1776) dan revolusi Prancis (1789) merupakan awal perubahan dalam pengembangan nasionalisme yang bersifat heterogen (di Amerika Serikat) dan nasionalisme yang bersifat homogen (di Prancis). Amerika Serikat merupakan hasil unifikasi koloni-koloni Inggris sebelumnya yang bertempur melawan metropolisnya untuk melawan hak-hak politik, toleransi terhadap perbedaan agama, dan kebebasan individu. Deklarasi kemerdekaan yang memproklamasikan suatu bentuk nasionalisme yang didasarkan pada kesinambungan suatu sistem gagasan liberal (kebebasan) dan pandangan hidup yang pluralis dan sekuler. Kebenaran-kebenaran tersebut dipegang sebagai bukti diri, bahwa semua manusia diciptakan sama, Sang Pencipta memberkati mereka dengan hak-hak yang tidak bisa disita, diantaranya adalah: hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak untuk mengejar kebahagiaan.¹⁰

Menurut Jack C. Plano nasionalisme adalah semangat memiliki bersama, atau sifat dari keinginan untuk berusaha mempertahankan identitas kelompok dengan melembagakan dalam bentuk sebuah negara. Nasionalisme dapat

diperkuat oleh perasaan ras, bahasa, sejarah dan agama; dan nasionalisme selalu terpaut dengan wilayah tertentu.¹¹

Nasionalisme merupakan suatu ideologi yang memiliki kekuatan pengaruh yang menggerakkan, merupakan perasaan yang menjadi bagian dari sesuatu dan berfungsi membangun perasaan bagi suatu komunitas nasional. Para penyebar ideologi ini mengatributkan kepada negara mereka suatu identitas kultural yang khas yang menetapkan bahwa negara itu terpisah dari negara-negara lain dan memberikan suatu tempat khusus di dalam proses historis. Komunitas ini (biasanya bersifat agung) diidentifikasi dengan seperangkat karakteristik yang unik yang menurut dugaan berasal dari realitas konstitusional, historis, geografis, agama, bahasa, etnis dan atau genetis. Sentimen-sentimen yang ditimbulkan oleh perasaan menjadi salah satu anggota komunitas ini bisa dibatasi pada suatu perasaan berharga yang luar biasa dalam kultur dan tradisi nasional itu tanpa terkait dengan tuntutan-tuntutan politik (“nasionalisme kultural”). Di pihak lain, ketika sentimen semacam itu memainkan suatu peran utama dalam dinamika gerakan politik, maka daya dorong nasionalisme umumnya bagi komunitas nasional dianggap membentuk suatu negara secara alamiah (apakah bersifat otonom atau bagian dari suatu federasi atau konfederasi negara), dimana kedaulatan yang seharusnya dimiliki atau terletak dalam tangan rakyat dijalankan oleh wakil yang terpilih atau yang memilih dirinya sendiri di dalam batas-batas teritorial yang diakui oleh komunitas politik internasional.¹²

¹¹ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*: Edisi Ketiga, Cho, England, hal. 29

Serbia dan Montenegro meliputi sebuah wilayah yang luasnya 102.350 km², dengan 199 km garis pantai. Permukaan negara ini sangat berbeda-beda; sebagian besar Serbia terdiri dari dataran rendah dan bukit-bukit yang rendah (kecuali wilayah Kosovo yang lebih bergunung-gunung) dan kebanyakan dari Montenegro terdiri atas gunung-gunung yang tinggi. Serbia sama sekali tidak memiliki laut, karena garis pantainya adalah milik Montenegro, yang juga memiliki satu-satunya fjord di Eropa selatan. Serbia dan Montenegro mempunyai variasi demografi yang lebih besar daripada kebanyakan negara Eropa lainnya. Ketiga bangsa yang terbesar adalah bangsa Serbia (62.6%), bangsa Albania (kebanyakan orang Gheg dan Tosk) (16.5%) dan bangsa Montenegro (5%) menurut sensus 1991. Negara ini juga mempunyai cukup besar penduduk orang Hongaria (kebanyakan orang Szekler dan Erkel meskipun ada pula beberapa sub-bangsa lainnya), Roma, Bulgaria, Makedonia, Rumania dan bangsa-bangsa Romans timur lainnya (termasuk Arumania, Megleno-Rumania dan Vlach), dan lusinan denominasi Slavia lainnya, yaitu Bosniak, Kroat, Bunjevci, Šokci, Goranci, Janjevci, Rusin, Slovak, bangsa Muslim dan Yugoslav. Sub-sub kelompok Turki juga masih menetap di Kosovo (kebanyakan Gagauz dan Seljuk). Ada pula sejumlah warganegara yang menyatakan kebangsaan mereka sebagai orang Mesir dan Ashkali. Kedua kelompok ini sebelumnya dianggap sebagai bagian dari orang Roma yang percaya bahwa mereka berasal dari Mesir dan Israel masa kini. Kebanyakan dari berbagai etnis ini berada di provinsi-provinsi Kosovo dan Vojvodina; di sana sejumlah kecil kelompok minoritas lainnya dapat

dengan kelompok yang lebih kecil di munisipalitas Presevo dan Bujanovac di Serbia Tengah, dan di tenggara Montenegro (munisipalitas Ulcinj). Penduduk Bosniak yang besar jumlahnya hidup di wilayah Sandzak di perbatasan antara Serbia dan Montenegro.¹³

Untuk memahami latar belakang pemisahan Montenegro dari Serbia harus dilihat konsep nasionalisme. Tidak diragukan lagi, munculnya perpecahan seperti di bekas pecahan Yugoslavia ini berawal dari muncul dan menguatnya nasionalisme di negara tersebut. Nasionalisme ini tumbuh seiring dengan keinginan Montenegro yang sebelumnya juga menginginkan pemisahan ini setelah Yugoslavia akhirnya pecah pada tahun 2003 namun menurut kelompok penantang kemerdekaan, Montenegro sebagai bagian dari Uni dengan Serbia mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi anggota Uni Eropa daripada sendiri. Akan tetapi Perdana Menteri Montenegro Milo Djukanovic akhirnya menyetujui Uni tersebut, apabila masyarakat melalui referendum diberi kesempatan menyuarakan pendapat mengenai Montenegro merdeka.

Perpisahan kedua negara pewaris Federasi Yugoslavia tersebut sebenarnya telah diprediksi para pengamat internasional sejak tiga tahun lalu, ketika Parlemen Federasi Yugoslavia (yang beranggotakan negara bagian Serbia dan Montenegro) mengadakan sidang pada 4 Februari 2003 di Beograd dan memutuskan tidak lagi menggunakan nama Yugoslavia dan menggantinya dengan nama negara Federasi Serbia Montenegro. Pada saat itu, Parlemen Yugoslavia memutuskan bahwa

negara baru Federasi Serbia Montenegro akan mencoba tetap bersatu setidaknya hingga tahun 2006. Disebutkan dalam keputusan parlemen itu bahwa pada tahun 2006, Serbia dan Montenegro memiliki kesempatan untuk memutuskan apakah tetap bersatu atau memisahkan diri.

2. Konsep Separatisme

Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok.¹⁴ Gerakan ini bisa timbul karena perasaan ketidakpuasan yang berlarut-larut atas sistem politik pemerintah, atau karena kepemilikan identitas teritorial yang berbeda, atau ideologi yang dapat mendorong suatu masyarakat dapat menolak pemerintah pusat di wilayahnya.

Kebanyakan dari negara bangsa memiliki sejumlah besar penduduk minoritas. Meskipun sudah berasimilasi cukup lama dengan kelompok-kelompok penduduk lainnya, banyak kelompok minoritas yang masih merasa terpisah dan berbeda. Rasa berbeda ini berkembang menjadi gerakan separatis dengan

negara tersendiri atau tidak jauh dari bentuk ekstrem ini, sebatas otonomi internal yang bebas dari negara induk.

Menurut Cathal J. Nolan separatisme sama artinya dengan pemisahan diri.¹⁵ Pemisahan diri ini maksudnya adalah secara resmi menarik diri dari sebuah kesatuan politik atau federasi. Kebanyakan pemisahan diri ini melalui kekuatan perlawanan dan mungkin penjanjian melalui tindak kriminal daripada pergerakan politik. Namun ada beberapa juga melalui perdamaian. Hal ini didorong oleh prinsip *self determination* (hak untuk menentukan nasib sendiri), dan juga gambaran permusuhan dari sistem negara yang sudah menjadi sifat konservatif tentang kelangsungan hidup dari para anggotanya. Pada umumnya, pemisahan diri ini diintervensi oleh beberapa kekuatan luar yang bentuknya berupa bantuan militer atau pasukan-pasukan (tentara) untuk merealisasikan tindakan ini.¹⁶

Dasar yang sering digunakan kaum separatis untuk menjustifikasikan tindakannya adalah pengakuan dalam piagam PBB atas hak menentukan nasib sendiri (*right of self determination*). Jika identitas etnis berkombinasi dengan keyakinan *self determination* yang kuat, maka keinginan untuk memisahkan diri semakin kuat. Kaum separatis lebih memilih sendiri atau bergabung dengan negara lain yang mempunyai persamaan, karena itu akan memberikan kebebasan pada mereka untuk mengurus masalah-masalahnya sendiri tanpa campur tangan dari kelompok lain.

Gerakan separatisme ini merupakan benih dari berkembangnya nasionalisme di Montenegro. Gerakan separatis tidak selalu dilakukan dengan

tindak kekerasan, namun juga bisa dilakukan melalui proses damai. Hal ini pernah terjadi sebelumnya seperti perpecahan Cekoslowakia dan Uni Soviet, lepasnya Singapura dari Federasi Malaysia. Demikian pula dengan Montenegro, pemisahan negara Montenegro dari Serbia juga melalui proses damai yang dilakukan melalui referendum yang diajukan oleh Uni Eropa sebagai syarat yang harus ditempuh oleh Montenegro untuk bisa lepas dari Serbia.

Tujuan umum separatisme (pemisihan diri) dari suatu negara adalah membentuk negara sendiri. Berdirinya sebuah negara harus memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. Menurut para ahli, antara lain *Oppenheim-Launterpacht* ada tiga unsur pokok negara¹⁷, yaitu:

- a. Rakyat
- b. Wilayah/ Daerah, dan
- c. Pemerintah yang berdaulat
- d. Pengakuan dari negara-negara lain, sebagai unsur tambahan.

Adanya pengakuan dari negara-negara lain merupakan bahwa negara baru telah diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antar bangsa. Walaupun tanpa pengakuan negara lain, suatu negara tetap berdiri asalkan memenuhi ketiga hal unsur pokok. Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting yaitu dalam hubungan antar bangsa-bangsa, karena sebelum suatu negara melakukan hubungan internasional, maka ia terlebih dahulu harus melalui pintu pengakuan.

Pengalaman Montenegro tampak begitu kontras dengan pergulatan Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Kroasia, dan Macedonia yang memisahkan diri dari Federasi Yugoslavia dalam ketegangan, dan penuh pertarungan fisik. Proses disintegrasi itu malah menimbulkan tragedi kemanusiaan di Bosnia-Herzegovina karena terjadi pemusnahan etnis, ethnic cleansing, yang menewaskan puluhan ribu orang. Tidak sedikit pejabat Serbia diadili atas tuduhan melakukan kejahatan kemanusiaan. Serbia yang menjadi kekuatan utama Federasi Yugoslavia tampaknya menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan integritas wilayah Federasi Yugoslavia. Namun, proses disintegrasi sejak tahun 1991 itu seakan tidak pernah berhenti. Semula Montenegro bertahan dengan Serbia dalam Federasi Yugoslavia, tetapi akhirnya melepaskan diri juga.

Tidak seperti proses pemisahan wilayah lain dari Federasi Yugoslavia yang berlangsung dalam ketegangan, Montenegro meraih kemerdekaan melalui referendum, bukan pergulatan fisik. Tidak kalah menariknya, Serbia tidak menghalang-halangi secara keras keinginan Montenegro. Sebelumnya Serbia selalu bersikap reaktif dalam menghadapi setiap upaya pemisahan diri. Namun, sikap reaktif yang disertai penggunaan kekerasan itu membuat Serbia mendapat kecaman keras dunia internasional. Mungkin untuk menghindari kecaman dan sanksi dunia internasional, Serbia terkesan menahan diri ketika Montenegro melepaskan diri. Proses pemisahan Montenegro pun berlangsung mulus. Tidak terjadi kekacauan dan kekerasan, yang sering diidentikkan dengan kawasan

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka alasan Montenegro memisahkan diri dari Serbia adalah sebagai berikut:

1. Bangkitnya nasionalisme Montenegro yang berkembang menjadi gerakan separatisme/ disintegrasi.
2. Adanya kesempatan politik yang diberikan kepada Montenegro melalui referendum untuk menentukan nasib bangsanya sendiri.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis dalam mengulas kajian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis tentang metodologi Ilmu Hubungan Internasional dan teori-teori internasional pada umumnya dan latar belakang Montenegro memisahkan diri dari Serbia pada khususnya.
2. Mengkaji dan mengidentifikasi beberapa variabel yang berkaitan dengan pemisahan diri Montenegro dari Serbia
3. Untuk melengkapi tugas akhir penulis dan sekaligus sebagai

4. Secara khusus penelitian ini ditujukan demi memenuhi persyaratan akademis pada jenjang studi strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, jurusan ilmu hubungan internasional.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, penulis lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Dengan studi kepustakaan ini penulis berharap nantinya bisa menemukan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Sumber data kepustakaan yang penulis gunakan berasal dari berbagai literatur, buku, surat kabar, jurnal, situs internet dan sumber-sumber lainnya yang sekiranya bisa dipergunakan untuk mengupas masalah ini.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Bila pokok permasalahan telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi yang tegas terhadap pokok permasalahan itu. Bagi penulis sendiri penegasan batasan ini akan menjadi pedoman kerja. Penegasan ini berfungsi mencegah kemungkinan terjadinya keributan penelitian dan kekaburan wilayah persoalan. Untuk itu data skripsi ini dibatasi sejak pecahnya Yugoslavia pada tahun 1991 dan kemudian terbentuk Republik Federasi Yugoslavia yang terdiri dari Serbia Montenegro pada tahun

meskipun kurun waktu penelitian dibatasi, namun bukan suatu batasan kaku. Tahun-tahun sebelum dan sesudah periode ini tetap menjadi perhatian selama masih menyangkut kepentingan analisis dalam menyusun penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab akan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

- Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kondisi umum Montenegro. Membahas secara detail tentang sejarah Montenegro dan tinjauan umum tentang Montenegro.
- Bab III Membahas tentang pecahnya negara-negara Yugoslavia hingga menjadi Serbia Montenegro, perang Balkan dan dinamika hubungan antara negara Serbia dengan Montenegro.
- Bab IV Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang Montenegro memisahkan diri dari Serbia.

.....